

# MELONJAKAN ANGKA PARTISIPASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

POLICY BRIEF EDISI DESEMBER 2024

## DITULIS OLEH

- KEMAL HIDAYAH
- NOVI PRAWITASARI
- MARIA AGUSTINI PERMATA SARI

## DITUJUKAN KEPADA

- LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
- PEMERINTAH DAERAH



## EXECUTIVE SUMMARY

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan kualitas Reformasi Birokrasi. Namun tingkat partisipasi pemerintah daerah masih rendah (sekitar 30%) bahkan mayoritas berada pada predikat “Kurang”. Terdapat 3 masalah mendasar yang menyebabkan rendahnya partisipasi daerah, antara lain: belum adanya penunjukan admin instansi; data dukung kebijakan masih minim, serta Kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah terhadap evaluasi kebijakan. Policy Brief ini menawarkan lima alternatif solusi antara lain mempercepat akselerasi penetapan admin instansi, mengintegrasikan evaluasi IKK ke dalam dokumen-dokumen strategis daerah yang mengikat, belajar dari daerah dengan nilai IKK sangat baik, membangun standar serta sistem pengelolaan kebijakan, serta menguatkan peran analisis kebijakan.

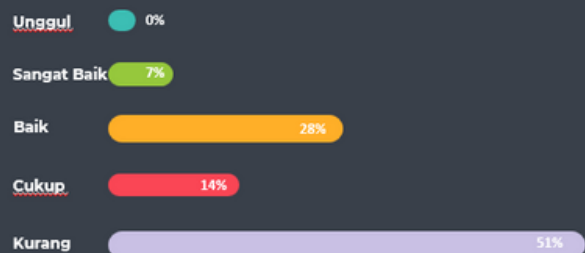
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) sehingga penguatan partisipasi dalam pengukuran IKK dari seluruh instansi pemerintah sangat diperlukan.

IKK diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.



## PENDAHULUAN

### CAPAIAN PREDIKAT IKK PEMERINTAH DAERAH



Hingga tahun 2023, tingkat partisipasi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam pengukuran IKK cukup tinggi, yakni lebih dari 60%. Namun sebaliknya, tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran IKK masih belum optimal. Dalam dua periode pengukuran IKK yaitu tahun 2021 dan 2023, tingkat partisipasi pemerintah daerah masih berkisar di angka 30% (tahun 2021) dan 32,68% (tahun 2023). Bahkan, mayoritas capaian predikat pemerintah daerah di tahun 2023 masih berada pada predikat “Kurang” (LAN, 2024).

Rendahnya tingkat partisipasi dan pencapaian instansi pemerintah daerah dalam pengukuran nasional IKK ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas reformasi birokrasi, namun juga akan berdampak terhadap pengelolaan kebijakan publik di daerah. Terlebih lagi, di tahun 2025 diharapkan keterlibatan instansi yang melakukan pengukuran IKK mencapai 100% dengan predikat minimal “Baik” (LAN, 2024). Oleh karena itu perlu dilakukan strategi kebijakan untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran IKK, khususnya yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

## DESKRIPSI MASALAH

Dari literature review yang dilakukan, maka setidaknya terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab masih banyaknya nilai IKK di daerah yang kurang maupun kosong, yakni:

### 1 Belum Ada Penunjukan Admin Instansi

Kebanyakan pemerintah daerah masih belum menentukan dan mengisi Lembar Konfirmasi Data Administrator IKK. Mereka menyatakan bahwa di daerah masih silang pendapat terkait unit maupun pejabat yang mengampu Admin IKK, khususnya antara Bagian/Biro Organisasi atau Bagian/Biro Hukum (hasil wawancara, 2024).

Selain itu sebagian dari mereka juga ada yang belum mengetahui terkait pengisian dan pengiriman Lembar Konfirmasi Admin IKK (hasil wawancara, 2024). Hal ini menyebabkan LAN sebagai koordinator pengukuran IKK, tidak dapat membuat/aktivasi akun Admin Instansi dalam sistem IKK. Aktivasi akun Admin Instansi dilakukan dengan mengisi lembar konfirmasi dan dikirimkan ke LAN dalam PDF ke email: [indekskualitaskebijakan@gmail.com](mailto:indekskualitaskebijakan@gmail.com).

**LEMBAR KONFIRMASI  
DATA ADMINISTRATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)  
DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH\***

.....

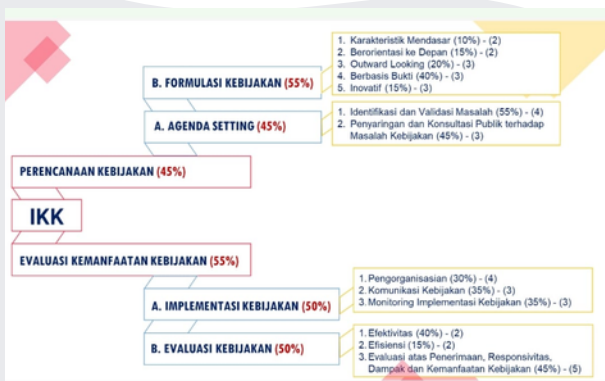
Bersama ini kami tugaskan 1 (satu) orang sebagai Admin Instansi (**usulan baru/perubahan**)\* untuk mengelola proses penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dalam sistem informasi Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara RI, dengan data sebagai berikut:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Nomor Whatsapp :  
Email aktif :

.....  
Mengetahui  
(paling rendah JPT Pratama),  
.....  
NIP. ....

\*coret yang tidak sesuai

Lembar konfirmasi yang telah diisi dapat dikirimkan ke LAN dalam format portable document (PDF) ke email: [indekskualitaskebijakan@gmail.com](mailto:indekskualitaskebijakan@gmail.com)



### 2 Data Dukung Kebijakan Masih Minim

Bagi daerah yang mendapatkan nilai rendah, kendala utama adalah pada pengisian bukti dukung. Mereka tidak dapat menyertakan data dukung yang menunjang jawaban mereka bahwa tahapan penyusunan kebijakan mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan sudah dilakukan dengan baik.

Sering kali enumerator menjawab bahwa mereka sudah melakukan tahapan pengelolaan kebijakan dengan baik, namun mereka tidak dapat membuktikan, karena data dukung kebijakan tidak terdokumentasi dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah (hasil wawancara, 2024). Selain minimnya data dukung, beberapa enumerator juga mengakui masih memiliki pemahaman yang minim terkait pertanyaan dalam pengukuran IKK serta bukti dukung yang diperlukan dalam menjawab 39 pertanyaan yang diajukan (hasil wawancara, 2024).

Banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami pentingnya evaluasi kebijakan, termasuk pengukuran IKK. Bagi sebagian daerah, proses ini sering dianggap sebagai tugas tambahan yang kurang mendesak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan teknis tentang IKK membuat daerah kesulitan mengikuti proses pengukuran secara efektif. Rendahnya komitmen pimpinan daerah juga menjadi hambatan, karena evaluasi kebijakan belum dilihat sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (hasil wawancara, 2024).

### ALTERNATIF SOLUSI

Permasalahan rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran (IKK) tidak hanya menunjukkan adanya hambatan teknis, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola kebijakan publik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang mampu mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan. Berikut beberapa alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut:

#### **AKSELERASI PENETAPAN ADMIN INSTANSI**

Awal tahun 2025 sebaiknya pemerintah daerah segera menetapkan Admin IKK, dan mengirimkan informasi tersebut kepada LAN untuk dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu LAN juga diharapkan lebih dini dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pengukuran IKK tahun 2025, salah satunya dengan menyampaikan surat edaran terkait Pengisian Lembar Konfirmasi Data Administrator IKK, dengan jangka waktu tertentu. Apabila pemerintah daerah tidak mengembalikan lembar konfirmasi tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka LAN masih memiliki banyak waktu untuk mengkonfirmasi kepada pemerintah daerah.

#### **MENINGTEGRASIKAN PENGUKURAN IKK KEDALAM DOKUMEN-DOKUMEN STRATEGIS DAERAH YANG MENGIKAT**

Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, maka pengukuran IKK dapat dicantumkan sebagai salah satu IKU Pemerintah Daerah ataupun PK Sekretariat Daerah Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan IKK ke dalam indikator kinerja utama daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk memberikan perhatian pada upaya pengumpulan dan pelaporan data evaluasi kebijakan. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran IKK memiliki konsekuensi langsung terhadap penilaian akuntabilitas daerah, sehingga meningkatkan urgensinya bagi pemerintah daerah.

#### **BELAJAR DARI DAERAH DENGAN NILAI IKK “SANGAT BAIK”**

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Admin Instansi maupun Enumerator, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki nilai Sangat Baik dalam pengukuran IKK. Melalui kerjasama ini diharapkan pemerintah daerah yang telah mendapatkan kategori Sangat Baik dapat menjadi mentor bagi pemerintah daerah lainnya dalam melengkapi bukti dukung serta memperkuat sistem pengelolaan kebijakan.

## **MEMBANGUN STANDAR SERTA SISTEM PENGELOLAAN KEBIJAKAN**

Pemerintah daerah sebaiknya mulai membangun standar serta sistem pengelolaan kebijakan daerah, terkait proses dokumentasi kebijakan. Untuk memastikan kelengkapan dokumentasi dan arsip kebijakan dapat dilakukan dengan penataan SOP penyusunan kebijakan serta dapat diperkuat dengan ketersediaan sistem informasi pendokumentasian kebijakan mulai dari proses agenda setting hingga evaluasi kebijakan.

Salah satu standar penyusunan kebijakan yang dapat menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dengan memastikan bahwa setiap proses penyusunan kebijakan telah melalui telaahan atau analisis yang dibuktikan dengan naskah penjelasan, naskah urgensi, kajian kebijakan hingga naskah akademik. Selain membantu pemerintah daerah dalam penyediaan bukti dukung pada pengukuran IKK, upaya membangun standar serta sistem pengelolaan kebijakan ini juga dapat menjadi input bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan.

## **MENGUATKAN PERAN ANALIS KEBIJAKAN**

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (AK) merupakan jabatan yang banyak tersebar pada level pemerintah daerah. Keberadaan AK ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas. Selain berfungsi untuk memberikan rekomendasi kebijakan, pemerintah daerah juga dapat mendorong AK dalam mengawal pengelolaan kebijakan, khususnya di masing-masing perangkat daerah.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Lima alternatif solusi yang telah diajukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran IKK, dapat dibagi kedalam dua tahapan, yakni solusi jangka pendek dan jangka menengah. Untuk menguatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengukuran IKK, maka pada solusi jangka pendek pemerintah daerah didorong untuk dapat melakukan penetapan Admin Instansi serta mengintegrasikan evaluasi IKK dalam dokumen-dokumen strategis daerah diawal tahun 2025. Selain itu pemerintah daerah juga dapat belajar dari daerah lain yang telah mendapatkan peringkat Sangat Baik dalam pengukuran IKK. Kemudian LAN juga diharapkan dapat lebih dini melakukan sosialisasi terkait penetapan admin instansi IKK kepada pemerintah daerah.

Untuk solusi jangka menengah, dalam mengoptimalkan pengelolaan kebijakan dan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menyiapkan bukti dukung pengukuran IKK pada masa mendatang, maka pemerintah daerah dapat membangun standar serta sistem pengelolaan kebijakan yang memudahkan perangkat daerah dalam mengelola kebijakan, serta mengoptimalkan peran AK dalam mengawal pengelolaan kebijakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- LANRI. (2023). Melalui Pengukuran IKK Tahun 2023, LAN Dorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Instansi Pemerintah. Diakses dari <https://lan.go.id/?p=14647>
- LANRI. (2024). Tingkat Partisipasi Daerah dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Belum Optimal. Diakses dari <https://lan.go.id/?p=17468>
- LANRI. (2023). Umumkan Hasil Pengukuran IKK dengan Predikat Unggul, LAN Selenggarakan Seminar Nasional Best Practices Sharing Pengelolaan Kebijakan Publik. Diakses dari <https://lan.go.id/?p=14647>